

# KAPASITAS ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN DI KOTA TANGERANG

Muhamad Bilal  
NPP. 32.0581

Asdaf Kota Tangerang, Banten  
Program Studi Manajemen Keamanan Dan Keselamatan Publik

Email: [32.0581@praja.ipdn.ac.id](mailto:32.0581@praja.ipdn.ac.id)

Pembimbing Skripsi: Dr. Petrus Polyando, S.STP, M.Si.

## ABSTRACT

**Problem/Background (GAP):** Tangerang City has a high fire incidence rate due to population density, industrial activity, and technical and human factors. **Purpose:** The purpose of this study is to describe the organizational capacity of BPBD in dealing with fire disasters in Tangerang City. **Method:** This study uses a qualitative method with a descriptive approach to analyze the organizational capacity of BPBDs based on Douglas Norton's (2003) organizational capacity theory, which includes two main dimensions, namely resources (employees, facilities and infrastructure, budget, and technology) and management (leadership strategies, programs, and relationships with various parties). **Results/Findings:** The results showed that the organizational capacity of BPBD in fire management still has various obstacles. In terms of resources, the number of personnel available is not sufficient, and there are still limitations in terms of education and technical training for members. In addition, the facilities and infrastructure owned are also still limited, both in terms of quantity and quality, which has an impact on the effectiveness of fire management. The fire reporting system that relies on the 112 call center and the Tangerang Live application is quite effective, but there are still obstacles in the speed of response due to location and the quality of reports received. In terms of management, BPBD Tangerang City has implemented good leadership and established cooperation with various parties to improve operational effectiveness. **Conclusion:** Based on the results of the discussion, this study concludes that the organizational capacity of the Regional Disaster Management Agency in handling fires in Tangerang City, when viewed from the resource dimension, is still inadequate.

**Keywords:** BPBD, Capacity, Fire Management

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Kota Tangerang memiliki tingkat kejadian kebakaran yang tinggi akibat kepadatan penduduk, aktivitas industri, serta faktor teknis dan manusiawi. **Tujuan:** tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kapasitas organisasi BPBD dalam penanggulangan bencana kebakaran di Kota Tangerang. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis kapasitas organisasi BPBD berdasarkan teori kapasitas organisasi Douglas

Norton (2003), yang mencakup dua dimensi utama, yaitu sumber daya (pegawai, sarana dan prasarana, anggaran, dan teknologi) serta manajemen (strategi kepemimpinan, program, dan relasi dengan berbagai pihak). **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas organisasi BPBD dalam penanggulangan kebakaran masih memiliki berbagai kendala. Dari segi sumber daya, jumlah personel yang tersedia belum mencukupi, serta masih terdapat keterbatasan dalam aspek pendidikan dan pelatihan teknis bagi anggota. Selain itu, sarana dan prasarana yang dimiliki juga masih terbatas, baik dari segi jumlah maupun kualitas, yang berdampak pada efektivitas penanganan kebakaran. Sistem pelaporan kebakaran yang mengandalkan call center 112 dan aplikasi Tangerang Live cukup efektif, tetapi masih memiliki kendala dalam kecepatan respons akibat faktor lokasi dan kualitas laporan yang diterima. Dalam aspek manajemen, BPBD Kota Tangerang telah menerapkan kepemimpinan yang baik dan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan efektivitas operasional. **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kapasitas organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan kebakaran di Kota Tangerang, jika dilihat dari dimensi sumber daya masih belum memadai.

**Kata kunci:** BPBD, Kapasitas, Penanggulangan Kebakaran.

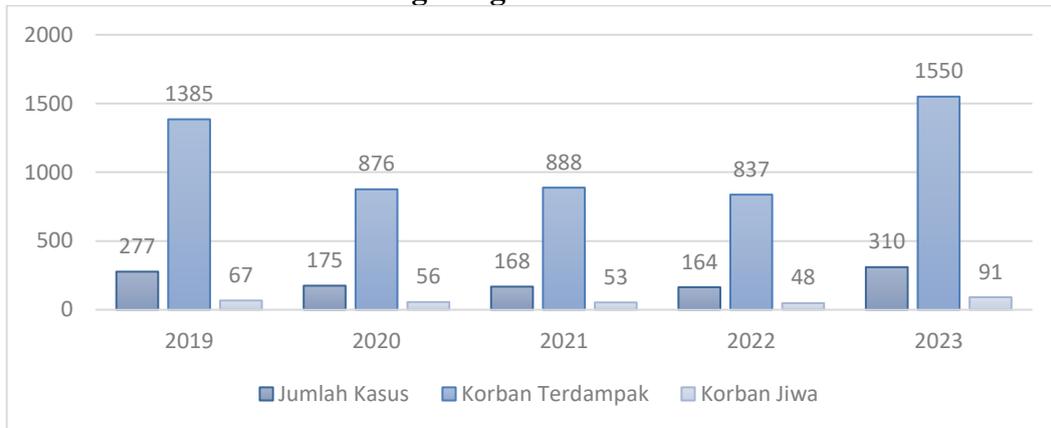
## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia Organisasi pemerintah merupakan lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Di tingkat daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur pembentukan organisasi pemerintah daerah berdasarkan prinsip otonomi. Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sebagaimana diatur dalam PP No. 18 Tahun 2016, terdiri atas perangkat sektoral, kewilayahan, dan penunjang, yang menjalankan pelayanan publik dan pembangunan. Dalam hal penanggulangan bencana, daerah diwajibkan membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 24 Tahun 2007 dan diperkuat oleh PP No. 21 Tahun 2008. BPBD bertugas mengelola seluruh tahapan penanggulangan bencana, dari prabencana hingga pascabencana, serta bekerja sama dengan berbagai pihak.

Menurut Wargadinata (2017), kualitas pengukuran kinerja dalam organisasi publik sangat penting untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas, sehingga pengukuran yang akurat dapat membantu organisasi dalam meningkatkan kapasitas dan kinerja dalam menghadapi tantangan operasional, seperti penanggulangan bencana kebakaran. Efektivitas BPBD sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten serta sarana dan prasarana yang memadai, seperti alat pemantau risiko dan sistem komunikasi. Hal ini sesuai prinsip tepat fungsi dan ukuran dalam PP No. 18 Tahun 2016, serta pembentukan BPBD sebagai perangkat daerah wajib berdasarkan Perpres No. 8 Tahun 2008. Sebagai kota besar di Provinsi Banten, Kota Tangerang termasuk wilayah rawan bencana, terutama banjir dan kebakaran. BPBD Kota Tangerang memiliki tanggung jawab besar dalam kesiapsiagaan, mitigasi, tanggap darurat, dan pemulihan (BPBD Kota Tangerang, 2022). Kebakaran di kota ini umumnya disebabkan oleh kelalaian manusia dan korsleting listrik, yang telah menimbulkan kerugian besar dalam beberapa tahun terakhir (BPBD Kota Tangerang, 2023). Berikut adalah grafik bencana kebakaran di Kota Tangerang tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar 1.

**Gambar 1**  
**Bencana Kebakaran di Kota Tangerang Tahun 2019-2023**



Sumber : BPBD Kota Tangerang

Berdasarkan grafik yang ada, jumlah kasus kebakaran menunjukkan fluktuasi yang signifikan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, terjadi lonjakan tinggi dengan 277 kasus kebakaran yang mengakibatkan 67 korban jiwa. Tahun 2020 mencatat penurunan jumlah kasus kebakaran, baik dalam jumlah korban terdampak maupun korban jiwa, meskipun masih ada 56 korban jiwa, menunjukkan bahwa risiko kebakaran tetap tinggi. Penurunan kasus kebakaran berlanjut pada tahun 2021, meskipun jumlah korban terdampak dan korban jiwa masih cukup signifikan. Tahun 2022 menunjukkan penurunan yang lebih stabil dalam jumlah kasus, korban terdampak, dan korban jiwa. Namun, pada tahun 2023 terjadi peningkatan yang signifikan, dengan jumlah kasus kebakaran dan korban terdampak meningkat drastis menjadi 1.550 orang, serta korban jiwa yang mencapai 91 orang, tertinggi dalam lima tahun terakhir. Tingginya intensitas kebakaran di Kota Tangerang menjadi isu strategis yang memerlukan perhatian serius, mengingat dampaknya yang besar terhadap keselamatan masyarakat, kerugian ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Kota Tangerang, dengan pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang pesat, menghadapi risiko kebakaran yang semakin kompleks akibat meningkatnya aktivitas industri, kepadatan permukiman, dan potensi kelalaian dalam pengelolaan sumber daya. BPBD, sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam manajemen bencana, diharapkan dapat menjalankan fungsi pencegahan, mitigasi, respons, dan pemulihan secara efektif. Namun, data awal menunjukkan bahwa BPBD Kota Tangerang masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan infrastruktur pemadam kebakaran, kurangnya pendidikan dan pelatihan, masalah aksesibilitas lokasi, dan kurangnya sinergi dalam pelaksanaan program pencegahan. Meskipun BPBD seharusnya menjadi garda terdepan dalam mengurangi risiko dan menangani kebakaran, kenyataannya belum dapat memaksimalkan perannya dalam mengatasi bencana kebakaran. Samaham dan Simbolon (2024) menekankan pentingnya tata kelola kolaboratif dalam penanggulangan bencana, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas respons dan mitigasi bencana di tingkat daerah. Coppola (2007) menjelaskan bahwa manajemen bencana internasional mengedepankan pendekatan sistematis yang melibatkan koordinasi berbagai pihak untuk meminimalisir dampak bencana. Selaras dengan itu, Emerson dan Nabatchi (2015) menekankan bahwa kolaborasi antar lembaga menjadi kunci utama dalam tata

kelola bencana agar respons dapat berjalan efektif dan efisien. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara potensi yang dimiliki Kota Tangerang dengan kapasitas BPBD dalam menanggulangi kebakaran.

### **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Kesenjangan dalam kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang dalam menanggulangi kebakaran terlihat dari beberapa aspek krusial. Meskipun BPBD memiliki peran penting, infrastruktur pemadam kebakaran yang terbatas, kurangnya pendidikan dan pelatihan untuk petugas serta masyarakat, aksesibilitas lokasi yang sulit dijangkau, dan kurangnya sinergi dalam pelaksanaan program pencegahan kebakaran menjadi kendala utama. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan antara potensi yang dimiliki oleh Kota Tangerang dengan kapasitas BPBD dalam menghadapi bencana kebakaran secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kesenjangan tersebut serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kapasitas BPBD dalam penanggulangan kebakaran di Kota Tangerang.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terkait peningkatan kapasitas organisasi dalam penanggulangan bencana telah dilakukan oleh berbagai peneliti dan praktisi, yang dapat dijadikan referensi untuk membandingkan dan menganalisis penelitian ini dalam konteks yang berbeda. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Sinamo dan Rohmadin (2024) di Kabupaten Dairi membahas upaya pengembangan kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Dairi dalam menghadapi bencana longsor yang sering terjadi, terutama pada musim hujan. Wilayah Kabupaten Dairi memiliki potensi bahaya longsor tingkat sedang, dan BPBD dituntut untuk mengoptimalkan kapasitas mereka dalam mitigasi bencana tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang menghasilkan temuan bahwa kapasitas BPBD Kabupaten Dairi dalam penanggulangan bencana longsor masih belum optimal, dengan kekurangan utama pada kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, infrastruktur yang terbatas, dan keterbatasan anggaran.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Mashar dan Khoirul (2019) berjudul *Upaya Peningkatan Kapasitas Organisasi Pengurangan Risiko Bencana (OPRB) Desa Sambungrejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang* menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas OPRB Desa Sambungrejo dapat diwujudkan melalui penyusunan kajian risiko bencana, peningkatan keterampilan dalam penanganan darurat, mitigasi, serta rehabilitasi bencana. Program ini menunjukkan bahwa OPRB Desa Sambungrejo kini lebih siap dan mandiri dalam merespons bencana, baik di tingkat desa maupun di Kabupaten Magelang. Selanjutnya, Sitorus et al. (2021) melakukan penelitian di Kabupaten Tolikara dengan judul *Peningkatan Kapasitas Daerah Dalam Upaya Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Tolikara*, yang fokus utamanya adalah mengidentifikasi bencana umum di wilayah tersebut serta mengevaluasi kesiapan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan. Penelitian ini menekankan pentingnya pendidikan kebencanaan dan sistem peringatan dini untuk memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi bencana alam.

Ketiga penelitian di atas menunjukkan tantangan yang serupa, yakni keterbatasan infrastruktur, anggaran, serta kurangnya pendidikan kebencanaan dan sistem peringatan dini yang optimal. Namun, penelitian ini lebih menekankan tantangan khas perkotaan,

seperti penanganan kebakaran di kawasan industri dan permukiman padat, penggunaan teknologi modern, regulasi keselamatan bangunan, serta penguatan kualifikasi sumber daya manusia di bidang kebakaran. Oleh karena itu, perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus bencana yang ditangani dan konteks wilayah yang berbeda. Penelitian lainnya, yang dilakukan oleh Mulyadi dan Mujahidin (2023) di Lombok Tengah, berjudul *Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran Di Kabupaten Lombok Tengah (Studi Kasus di Badan Penanggulangan Bencana Daerah)*, berfokus pada evaluasi efektivitas program peningkatan kapasitas yang dilaksanakan oleh BPBD. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran di Kabupaten Lombok Tengah belum optimal. Meskipun pelatihan telah dilakukan, masih banyak aparaturnya yang belum mengikutinya, dan kegiatan seperti workshop atau magang belum pernah dilaksanakan.

Selain itu, Ma'romah dan Ardianto (2020) melakukan penelitian di Pekanbaru dengan judul *Pengembangan Kapasitas Pemadam Kebakaran Pada Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru*, yang berfokus pada peningkatan kompetensi pemadam kebakaran melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi untuk meningkatkan kemampuan dalam menangani kebakaran yang terus meningkat di Pekanbaru. Penelitian ini mengungkapkan perlunya peningkatan struktur organisasi dan manajemen operasional aparaturnya pemadam kebakaran agar lebih siap dan responsif dalam menangani kebakaran.

Rekomendasi dari berbagai penelitian ini umumnya menyoroti kebutuhan pelatihan yang berkelanjutan, penambahan personel, perbaikan infrastruktur, serta peningkatan koordinasi antarinstansi untuk mencapai efektivitas dalam penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran. Terdapat perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan di Lombok Tengah dan Pekanbaru, yaitu terletak pada konteks geografis, urbanisasi, serta tantangan spesifik dalam pengelolaan kebakaran di kawasan industri dan permukiman padat penduduk, yang menjadi fokus utama penelitian ini. Dari berbagai penelitian tersebut, yang membahas kapasitas organisasi dalam penanggulangan bencana kebakaran, belum banyak yang mengkaji kapasitas organisasi dalam penanggulangan kebakaran di kawasan industri dan permukiman padat penduduk. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan tema tersebut, dengan harapan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemecahan masalah kebencanaan terkait penanggulangan bencana kebakaran di Kota Tangerang.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kapasitas organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang dalam penanggulangan bencana kebakaran, yang masih terbatas dalam kajian-kajian sebelumnya. Penelitian ini secara khusus menggunakan pendekatan teoritis dari Douglas Norton (2003), yang menekankan pentingnya dua dimensi utama dalam penguatan kapasitas organisasi, yaitu sumber daya dan manajemen.

Dalam dimensi sumber daya, penelitian ini mengkaji secara komprehensif aspek-aspek seperti sumber daya aparaturnya, sarana dan prasarana, anggaran, serta penggunaan teknologi dalam mendukung respons BPBD terhadap bencana kebakaran. Sementara dalam dimensi manajemen, fokus diarahkan pada strategi kepemimpinan, program dan proses manajemen, serta relasi dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti instansi pemerintah lain, pemangku kepentingan lokal, dan masyarakat.

Dengan berfokus pada identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas BPBD, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam kajian manajemen bencana, khususnya dengan menyoroti kesenjangan yang ada antara potensi kapasitas organisasi BPBD dan tantangan nyata yang dihadapi di lapangan. Selain memperkaya khazanah teori terkait kapasitas organisasi dalam konteks penanggulangan bencana kebakaran, penelitian ini juga memberikan solusi praktis yang dapat digunakan oleh BPBD dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana. Temuan ini diharapkan menjadi acuan penting bagi pengembangan kebijakan dan studi-studi lanjutan dalam bidang keamanan dan keselamatan publik.

### **1.5. Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kapasitas organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana kebakaran di Kota Tangerang secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas BPBD dalam menjalankan fungsi pencegahan, mitigasi, respons, dan pemulihan terkait kebakaran, serta untuk mengevaluasi infrastruktur, sumber daya manusia, dan koordinasi antar lembaga yang mendukung pelaksanaan tugas tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji adanya kesenjangan antara kapasitas BPBD dengan kebutuhan yang ada di lapangan, serta memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam mengatasi bencana kebakaran secara lebih optimal dan terkoordinasi.

## **II. METODE**

Dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang kapasitas organisasi BPBD Kota Tangerang dalam penanggulangan bencana kebakaran. Pendekatan penelitian adalah rencana dan tahapan penelitian yang terdiri dari langkah-langkah berdasarkan anggapan-anggapan yang luas hingga metode-metode terperinci dalam pengumpulan, analisis, dan interpretasi data (Creswell, 2016). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggambarkan fenomena secara menyeluruh dan kontekstual, terutama terkait perilaku, kebijakan, dan hambatan yang dihadapi BPBD. Menurut Simangunsong (2017), data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif, di mana data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Observasi memberikan data mendalam dari konteks sosial yang sedang berlangsung. Selain itu, dokumentasi digunakan sebagai pelengkap, seperti notulensi rapat, surat tugas, dan laporan kegiatan (Patton 2022). Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara terstruktur dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan panduan pertanyaan yang sistematis namun terbuka, untuk menggali informasi lebih dalam. Studi dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui dokumen resmi seperti struktur organisasi, anggaran tahunan, dan data kebakaran. Informan dalam penelitian ini adalah pihak internal BPBD Kota Tangerang yang dipilih karena memiliki pengetahuan langsung, pengalaman, serta peran strategis dalam pelaksanaan penanggulangan kebakaran. Pemilihan informan dilakukan secara purposive berdasarkan keterlibatan aktif mereka dalam manajemen kebencanaan. Penelitian ini dilaksanakan di kantor BPBD Kota Tangerang sebagai lokasi utama penelitian, karena merupakan lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah tersebut. Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan

selama periode yang telah ditentukan peneliti, menyesuaikan dengan jadwal kesediaan informan dan proses pengumpulan data. Validitas data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber untuk memastikan keabsahan informasi yang diperoleh dari berbagai pihak.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kota Tangerang, yang terletak di Provinsi Banten, berbatasan langsung dengan Jakarta di sebelah timur dan memiliki luas wilayah 164,55 km<sup>2</sup>. Kota ini terdiri dari 13 kecamatan dan 104 kelurahan, serta memiliki kepadatan penduduk tinggi yang turut meningkatkan risiko kebakaran, baik di permukiman, kawasan industri, maupun lahan kosong. Dengan keberadaan banyak pabrik yang menyimpan bahan mudah terbakar, ditambah faktor iklim seperti musim kemarau panjang, Kota Tangerang menjadi daerah yang rentan terhadap kebakaran. Lahan kosong yang sering digunakan untuk pembuangan sampah liar dan infrastruktur transportasi yang padat juga memperburuk potensi kebakaran, menjadikan kota ini lebih rawan terkena bencana kebakaran, terutama pada musim kemarau dan di area industri. Kota Tangerang, dengan jumlah penduduk 1.912.679 jiwa pada tahun 2023, adalah salah satu kota terpadat di Indonesia, dengan kepadatan sekitar 12.000 jiwa per km<sup>2</sup>. Keberagaman etnis dan budaya serta dominasi usia produktif menjadi ciri khas kota ini, yang sebagian besar penduduknya adalah pendatang yang datang untuk bekerja di sektor industri, perdagangan, dan jasa. Di tengah populasi yang terus berkembang, Kota Tangerang menghadapi tantangan serius dalam penanggulangan bencana, khususnya kebakaran, yang sering terjadi di permukiman padat penduduk dan kawasan industri. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang, yang memiliki tugas dan fungsi untuk menangani kebakaran serta bencana lainnya, berperan penting dalam mengurangi risiko dan dampak kebakaran. BPBD mengelola infrastruktur penanggulangan bencana, termasuk kantor pusat koordinasi, posko pemadam kebakaran, dan penyediaan alat pemadam api ringan (APAR) di fasilitas umum. Selain itu, BPBD Kota Tangerang bekerja sama dengan masyarakat, relawan, dan lembaga non-pemerintah seperti Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan Palang Merah Indonesia (PMI), untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan mengurangi dampak kebakaran. Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, Kota Tangerang terus berupaya meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana kebakaran dan memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi risiko kebakaran.

#### **3.1. Kapasitas Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang**

Dalam penelitian ini, fokus utama diarahkan pada kemampuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang dalam menangani kebakaran melalui pengembangan kapasitas organisasi. Pengembangan kapasitas organisasi dipahami sebagai kemampuan menyeluruh suatu organisasi dalam mengelola sumber daya dan keahliannya secara efektif guna mencapai tujuan institusional. Kapasitas organisasi mencakup berbagai aspek fundamental seperti ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia, kecukupan sarana dan prasarana, stabilitas pendanaan, serta pemanfaatan teknologi yang mendukung operasional penanggulangan bencana. Selain itu, kapasitas organisasi juga meliputi tata kelola internal, strategi kepemimpinan, sistem manajemen yang berjalan, serta hubungan koordinatif dan kolaboratif dengan para pemangku

kepentingan eksternal. Keberhasilan organisasi dalam penanggulangan kebakaran sangat bergantung pada terpenuhinya semua komponen tersebut secara terpadu, sehingga mampu membentuk sistem organisasi yang tangguh, adaptif, dan responsif terhadap setiap potensi ancaman kebakaran. Salah satu dimensi kunci dalam kapasitas organisasi adalah kapasitas sumber daya, yang terdiri atas dua kelompok utama, yakni sumber daya manusia (SDM) yang meliputi kuantitas, kualitas, dan kompetensinya, serta sumber daya non-manusia seperti sarana prasarana, anggaran, dan infrastruktur teknologi yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD secara optimal.

### 3.1.1 Kapasitas Sumber Daya

Sumber daya manusia memegang peran krusial dalam seluruh tahapan manajemen organisasi, baik pada aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Dalam konteks organisasi penanggulangan bencana, keberadaan aparatur yang kompeten dan profesional menjadi penentu utama efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas. Aparatur BPBD, sebagai tenaga teknis dan fungsional, memiliki tanggung jawab dalam seluruh siklus manajemen kebencanaan, yang mencakup mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Oleh karena itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan, penguasaan keterampilan teknis, serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi strategi penting untuk meningkatkan kinerja institusi. Di Kota Tangerang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki total 278 anggota yang tersebar di berbagai kantor pusat dan pos pemadam kebakaran. Jumlah personel pada masing-masing pos disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan karakteristik wilayah kerjanya, guna memastikan respons cepat dan efektif terhadap kejadian kebakaran yang kerap terjadi di kawasan permukiman padat maupun kawasan industri. Informasi lebih rinci terkait distribusi anggota ini dapat dilihat dalam tabel jumlah personel BPBD Kota Tangerang di tiap pos pemadam.

**Tabel 1**  
**Jumlah Anggota BPBD Kota Tangerang**

No	Kantor / Pos	Jumlah Anggota
1	Markas Komando	72 orang
2	UPT Ciledug	42 orang
3	UPT Batu Ceper	42 orang
4	UPT Cibodas	38 orang
5	UPT Periuk	32 orang
6	Pos Pinang	20 orang
7	Pos Benda	16 orang
8	Pos Keroncong	16 orang

*Sumber: Renstra BPBD Kota Tangerang Tahun 2024-2026*

Berdasarkan data jumlah personel dan perbandingan dengan standar internasional, terlihat bahwa jumlah anggota BPBD Kota Tangerang saat ini masih belum memenuhi rasio ideal. Merujuk pada standar National Fire Protection Association (NFPA) 1710 Tahun 2020, rasio ideal petugas pemadam kebakaran adalah antara 1 petugas untuk setiap 1.000 hingga 2.000 penduduk. Dengan jumlah penduduk Kota Tangerang yang mencapai

hampir 1,9 juta jiwa, kebutuhan ideal petugas pemadam seharusnya berkisar antara 950 hingga 1.900 personel. Namun, saat ini Kota Tangerang hanya memiliki 278 personel BPBD, yang berarti terdapat kesenjangan signifikan dalam hal kapasitas sumber daya manusia. Kesenjangan ini menjadi salah satu hambatan utama dalam respons cepat dan efektif terhadap kebakaran, khususnya di wilayah-wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan tingkat kerentanan yang besar, seperti kawasan permukiman padat dengan akses terbatas serta kawasan industri yang memiliki potensi bahaya tinggi. Informasi dari hasil wawancara juga menguatkan temuan ini, di mana para informan menyatakan bahwa kekurangan personel berdampak langsung terhadap lambatnya penanganan ketika kebakaran terjadi secara bersamaan di beberapa titik. Oleh karena itu, peningkatan jumlah dan kapasitas petugas BPBD menjadi kebutuhan mendesak guna menjamin kesiapsiagaan dan ketanggapan Kota Tangerang dalam menghadapi risiko kebakaran yang terus meningkat. Berikut adalah versi yang telah diringkas dan dirumuskan ulang dalam satu paragraf akademis: Komposisi usia anggota BPBD Kota Tangerang didominasi oleh kelompok usia 30 hingga 40 tahun, dengan jumlah tertinggi pada usia 30 tahun sebanyak 156 orang. Kelompok usia ini merupakan usia produktif yang umumnya memiliki kekuatan fisik dan daya tahan tinggi, sangat relevan dengan tuntutan kerja di lapangan seperti pemadaman kebakaran dan penanganan darurat (Indikator Ketenagakerjaan Indonesia, 2023). Sementara itu, 75 anggota berusia antara 40 hingga 50 tahun dipandang penting dalam aspek pengalaman dan pengambilan keputusan strategis, seperti koordinasi, evaluasi risiko, dan pengelolaan operasi kebencanaan. Di sisi lain, kelompok usia 20 hingga 30 tahun yang berjumlah 47 orang dapat mendukung kegiatan operasional sebagai tenaga lapangan yang cepat dan responsif. Kombinasi lintas usia ini memberikan keseimbangan dalam struktur organisasi BPBD, menggabungkan kekuatan fisik, ketangkasan operasional, serta kedewasaan dalam pengambilan keputusan. Selain usia, keragaman latar belakang pendidikan anggota BPBD turut memberikan kontribusi terhadap efektivitas pelaksanaan tugas-tugas penanggulangan bencana. Dari total 278 anggota BPBD Kota Tangerang, hanya 84 orang yang telah memiliki sertifikat resmi, sementara 194 lainnya belum mengikuti diklat pemadam kebakaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggota masih mengandalkan pengalaman lapangan tanpa pelatihan teknis yang memadai, padahal sertifikasi sangat penting untuk memastikan kesiapan dan keselamatan dalam menghadapi situasi darurat. Meskipun mayoritas anggota berada pada usia produktif dan memiliki kekuatan fisik yang mendukung, tantangan masih ada dalam hal peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan yang sistematis dan berstandar operasional.

Sarana dan prasarana merupakan elemen vital dalam mendukung efektivitas operasional BPBD, khususnya dalam penanggulangan kebakaran. Ketersediaan dan kelayakan alat pemadam kebakaran, armada operasional seperti mobil pemadam, tangki air, serta perlengkapan keselamatan bagi petugas menjadi penentu utama keberhasilan dalam merespons kejadian kebakaran secara cepat dan tepat. Menurut standar National Fire Protection Association (NFPA 1901, 2016), unit armada pemadam harus memadai dan proporsional terhadap jumlah penduduk serta cakupan wilayah layanan, guna memastikan terpenuhinya standar pelayanan minimal. Dengan kata lain, tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai, respons kebakaran akan berjalan lambat dan berisiko tinggi, baik bagi keselamatan masyarakat maupun petugas di lapangan.

## **Tabel 2**

### Jumlah Unit Armada Pemadam Kebakaran

No	Kantor / Pos Pemadam	Jumlah Unit	Kondisi
1	Markas Komando	1 Unit Mobil Tangga	Rusak
		4 Unit Mobil pemadam 5000 L	Baik
		1 Unit Mobil Pemadam 5000 L	Rusak
		1 Unit Tanki Air 10.000 L	Baik
		1 Unit Tanki Air 5000 L	Rusak
2	UPT Ciledug	2 Unit Mobil pemadam 3000 L	Baik
		1 Unit Tanki Air 5000 L	Baik
3	UPT Batu Ceper	2 Unit Mobil pemadam 3000 L	Baik
		1 Unit Mobil Pemadam 3000 L	Rusak
		1 Unit Tanki Air 5000 L	Baik
4	UPT Cibodas	2 Unit Mobil Pemadam 3000 L	Baik
		1 Unit Tanki Air 5000 L	Baik
5	UPT Periuk	2 Unit Mobil Pemadam 3000 L	Baik
		1 Unit Mobil Pemadam 3000 L	Rusak
		1 Unit Tanki Air 5000 L	Baik
6	Pos Pinang	1 Unit Mobil Pemadam 3000 L	Baik
7	Pos Benda	1 Unit Mobil Pemadam 3000 L	Baik
8	Pos Keroncong	1 Unit Mobil Pemadam 3000 L	Baik

Sumber : Renstra BPBD Kota Tangerang Tahun 2024-2026

BPBD Kota Tangerang menghadapi kekurangan sarana dan prasarana yang memadai dalam penanggulangan kebakaran. Terdapat 18 unit mobil pemadam kebakaran, dengan hanya 15 unit dalam kondisi layak operasional dan 3 unit rusak. Berdasarkan standar National Fire Protection Association (NFPA) dan jumlah penduduk sekitar 1,9 juta jiwa, Kota Tangerang idealnya membutuhkan 38 unit mobil pemadam kebakaran dan 19 unit mobil tangki air. Namun, saat ini hanya tersedia 6 unit mobil tangki air, dengan 5 unit beroperasi dan 1 unit rusak. Selain itu, banyak kendaraan yang sudah tua dan tidak memenuhi standar, menghambat respons cepat, terutama di wilayah sulit dijangkau. Penambahan armada sedang dilakukan pada tahun 2025, namun masalah masih ada terkait keterbatasan UPT dan infrastruktur yang memperlambat penanganan kebakaran. Oleh karena itu, selain penambahan armada, perbaikan distribusi sarana, kualitas armada, dan penguatan infrastruktur serta personel sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kebakaran di Kota Tangerang.

Ketersediaan anggaran merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan organisasi, termasuk dalam penanggulangan bencana. BPBD Kota Tangerang mengelola anggaran kebencanaan berdasarkan kajian risiko bencana, dengan dana yang dialokasikan untuk pengadaan peralatan pemadam kebakaran, peningkatan jumlah personel, dan pelatihan intensif bagi petugas. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, pemerintah daerah bertanggung jawab atas alokasi anggaran kebencanaan dalam APBD, yang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan rencana penanggulangan bencana. Pada

tahun 2025, alokasi anggaran untuk kebakaran mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024, dengan tujuan memperkuat kapasitas BPBD dalam menangani kebakaran secara lebih efektif.

Berdasarkan informasi dari DPA-SKPD BPBD Kota Tangerang 2025, anggaran untuk BPBD Kota Tangerang dalam penanggulangan kebakaran pada tahun 2025 sebesar Rp28.652.932.586, jauh lebih besar dibandingkan dengan anggaran tahun 2024 yang hanya Rp8.346.384.800. Anggaran 2025 akan digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana yang lebih modern, termasuk kendaraan operasional dan alat pemadam kebakaran, serta peningkatan kapasitas personel melalui pelatihan dan pendidikan. Pada tahun 2024, BPBD mengalami kendala dalam pengadaan sarana dan prasarana serta pengembangan kapasitas anggota. Dengan tambahan anggaran pada tahun 2025, BPBD dapat memperkuat kesiapsiagaan dan respons terhadap kebakaran, serta meningkatkan koordinasi antarinstansi dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana. Pengelolaan anggaran yang baik diharapkan dapat memperkuat kapasitas BPBD, baik dari segi peralatan maupun sumber daya manusia, untuk penanggulangan kebakaran yang lebih efektif.

### **3.2 Manajemen**

Manajemen mencakup berbagai elemen penting seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang berperan untuk memastikan kelancaran operasional dan pencapaian tujuan organisasi. Dalam konteks penelitian ini, fokus manajerial meliputi strategi manajemen yang digunakan untuk mengatur sumber daya dan kegiatan, program serta proses manajemen yang terstruktur untuk memastikan efisiensi, dan pengelolaan hubungan yang baik dengan berbagai pihak terkait. Hal ini mencakup perumusan rencana, penetapan tugas, motivasi personel, serta pengawasan terhadap kinerja, untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

#### **3.2.1 Strategi Kepemimpinan**

BPBD Kota Tangerang menerapkan strategi kepemimpinan yang menggabungkan gaya kepemimpinan situasional dan transformasional dalam menanggulangi kebakaran. Kepemimpinan situasional terlihat dalam penyesuaian pendekatan yang dilakukan sesuai dengan kondisi di lapangan, seperti pengambilan keputusan cepat dalam situasi darurat dan pendekatan partisipatif dalam kondisi normal. Kepemimpinan transformasional tercermin dalam upaya inovasi, seperti integrasi dengan layanan darurat 112 dan aplikasi Tangerang Live, serta peningkatan kapasitas personel melalui pendidikan dan pelatihan. Pemimpin BPBD juga memastikan keselamatan tim dengan mengikuti prosedur keselamatan kerja yang ketat dan pemantauan kondisi personel di lapangan. Keputusan dalam situasi darurat diambil dengan cepat dan berbasis data untuk memastikan respons yang efektif, termasuk dalam mobilisasi personel dan peralatan. BPBD juga membangun sinergi dengan berbagai pihak, seperti aparat keamanan, tenaga medis, dan masyarakat, serta memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi, mempercepat respons, dan meningkatkan kesiapsiagaan warga. Dengan demikian, kombinasi strategi kepemimpinan yang tepat, pengambilan keputusan yang cepat, dan koordinasi yang baik menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas penanggulangan kebakaran di Kota Tangerang.

### 3.2.2 Program dan Proses Manajemen

Program dan proses manajemen di BPBD Kota Tangerang dirancang untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan efektivitas dalam penanggulangan kebakaran. Manajemen program berfokus pada produksi dan penyampaian layanan, sementara manajemen proses berkaitan dengan pengelolaan sumber daya dan proses internal organisasi. Salah satu program utama BPBD adalah pelatihan dan simulasi kebakaran, yang diadakan secara berkala untuk petugas pemadam kebakaran dan masyarakat umum. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menangani kebakaran serta mengurangi risiko korban jiwa dan kerugian materiil. Simulasi kebakaran dilakukan di lokasi strategis seperti permukiman padat penduduk, sekolah, perkantoran, dan pusat perbelanjaan. Masyarakat dilatih untuk menggunakan alat pemadam api ringan (APAR), teknik evakuasi yang aman, dan cara melaporkan kebakaran melalui layanan darurat seperti call center 112 dan aplikasi Tangerang Live. Program ini juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada petugas dalam menangani kebakaran skala kecil. Selain itu, BPBD Kota Tangerang juga mengadakan sosialisasi dan kampanye pencegahan kebakaran, yang meliputi penyuluhan tentang bahaya korsleting listrik, penggunaan gas elpiji yang aman, serta pentingnya sistem deteksi dini kebakaran. Kegiatan ini dilakukan melalui seminar, media sosial, serta kerja sama dengan berbagai instansi dan komunitas untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana kebakaran.

Berdasarkan data yang ada, BPBD Kota Tangerang telah melaksanakan berbagai program pelatihan dan simulasi kebakaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan aparat pemerintahan dalam menghadapi situasi darurat kebakaran. Program ini mencakup pelatihan untuk petugas BPBD, masyarakat umum, dan aparat pemerintahan, dengan tujuan utama untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kesadaran akan bahaya kebakaran serta cara-cara penanggulangannya. Proses manajemen penanggulangan bencana kebakaran di BPBD Kota Tangerang dimulai dengan perencanaan berbasis analisis risiko kebakaran yang terjadi di wilayah rawan. Rencana ini disusun dengan melibatkan berbagai instansi terkait, seperti Dinas Pemadam Kebakaran dan Kepolisian. BPBD juga membentuk tim tanggap darurat yang memiliki pembagian tugas yang jelas dan dilatih secara rutin untuk menangani kebakaran. Pelatihan dan simulasi kebakaran dilaksanakan secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan responsivitas baik bagi petugas maupun masyarakat.

Pada tahap pelaksanaan, BPBD berfokus pada respon cepat dengan memobilisasi tim ke lokasi kebakaran dan mengandalkan teknologi untuk mempercepat proses penanggulangan. Setelah kebakaran terjadi, BPBD melakukan evaluasi terhadap kejadian tersebut guna memperbaiki prosedur dan strategi yang ada. Pemulihan pasca-kebakaran juga dilakukan dengan memberikan bantuan kepada korban dan memperbaiki infrastruktur yang rusak, berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan instansi terkait lainnya. Evaluasi terhadap program-program penanggulangan kebakaran dilakukan secara rutin untuk memastikan efektivitasnya dan meningkatkan kualitas respons dalam menangani kebakaran. Evaluasi ini dilakukan melalui analisis laporan kejadian, tinjauan kinerja tim di lapangan, serta umpan balik dari masyarakat dan instansi terkait. Setiap kejadian kebakaran dievaluasi berdasarkan kecepatan respons, kendala yang dihadapi, dan efektivitas strategi pemadaman. Jika terdapat kekurangan dalam sistem operasional, seperti keterbatasan

peralatan atau perlunya peningkatan keterampilan personel, BPBD mengusulkan perbaikan melalui pengadaan alat baru, pelatihan tambahan, atau peningkatan koordinasi antarunit.

Kesimpulannya, BPBD Kota Tangerang telah melaksanakan berbagai program pendidikan, pelatihan, dan simulasi kebakaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta keterampilan dalam menangani kebakaran. Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan antara jumlah anggota BPBD yang telah mengikuti pelatihan dan jumlah total anggota, yang perlu diperhatikan untuk memastikan kesiapsiagaan yang optimal. Selain itu, evaluasi rutin terhadap program-program ini sangat penting untuk memastikan bahwa program penanggulangan kebakaran dapat terus ditingkatkan dan memberikan dampak positif yang nyata dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan respons terhadap kebakaran di Kota Tangerang.

### **3.2.3 Relasi Dengan Berbagai Pihak**

BPBD Kota Tangerang menunjukkan pentingnya koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai instansi serta pemangku kepentingan lainnya dalam upaya penanggulangan kebakaran. Dalam situasi darurat kebakaran, BPBD bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti kepolisian untuk pengamanan dan pengaturan lalu lintas, Dinas Perhubungan untuk memastikan akses kendaraan pemadam, serta lembaga kesehatan untuk penanganan medis korban. Koordinasi dilakukan melalui Pusdalops yang siaga 24 jam untuk memastikan respons yang cepat dan efektif. BPBD Kota Tangerang juga menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah daerah lain, terutama dalam situasi darurat yang membutuhkan tambahan sumber daya, seperti mobil pemadam dari daerah terdekat. Kolaborasi ini dilakukan melalui komunikasi intensif dan prosedur yang telah disepakati, yang memungkinkan bantuan segera dikerahkan sesuai kebutuhan di lapangan. Selain itu, BPBD juga aktif bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan instansi pelatihan dalam mengadakan program Diklat untuk meningkatkan kapasitas personel dan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran.

Di sisi lain, BPBD juga terlibat dalam penyuluhan dan sosialisasi dengan berbagai pihak, seperti organisasi masyarakat, sekolah, dan LSM, untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya kebakaran, cara pencegahan, serta prosedur evakuasi yang tepat. Dalam hal pengelolaan sumber daya, BPBD berkolaborasi dengan Dinas Sosial untuk mendistribusikan bantuan logistik kepada korban kebakaran.

Meskipun BPBD Kota Tangerang memiliki kesiapsiagaan 24 jam, ada beberapa kendala dalam koordinasi, terutama di luar jam operasional, seperti malam atau dini hari, yang bisa memperlambat respons terhadap kebakaran. Di samping itu, akses menuju lokasi kebakaran di area padat penduduk dengan jalan sempit juga menjadi tantangan meskipun sudah dilakukan koordinasi dengan kepolisian dan Dinas Perhubungan. Namun, BPBD Kota Tangerang tetap berupaya mengatasi tantangan ini dengan aktif berkomunikasi dengan masyarakat dan lembaga terkait. Salah satunya adalah pembentukan dan pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) yang dapat memberikan respons awal sebelum bantuan datang. BPBD juga melakukan sosialisasi kesiapsiagaan bencana melalui penyuluhan, simulasi, serta media sosial dan website resmi.

Kesimpulannya, BPBD Kota Tangerang telah berhasil menjalin koordinasi dan kolaborasi yang kuat dengan berbagai instansi untuk meningkatkan respons terhadap kebakaran. Meskipun ada beberapa kendala, BPBD tetap siap siaga dan aktif berkomunikasi dengan masyarakat serta meningkatkan keterlibatan mereka dalam

penanggulangan kebakaran. Dengan berbagai langkah ini, BPBD Kota Tangerang terus berupaya meningkatkan efektivitas penanggulangan kebakaran melalui koordinasi, kolaborasi, dan pemberdayaan masyarakat.

### **3.3 Temuan Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian tentang kapasitas organisasi BPBD Kota Tangerang dalam penanggulangan kebakaran, terdapat beberapa temuan penting yang berkaitan dengan sumber daya dan manajemen. Jumlah anggota BPBD masih belum ideal jika dibandingkan dengan rasio yang dibutuhkan, dengan mayoritas anggota hanya berpendidikan SMA dan banyak yang belum mengikuti pelatihan formal pemadam kebakaran, mengandalkan pengalaman kerja yang tidak selalu cukup efektif. Sarana dan prasarana juga terbatas, dengan jumlah pos dan unit pelaksana teknis (UPT) yang minim, sehingga pelayanan belum merata di seluruh kecamatan. Meskipun anggaran untuk penanggulangan kebakaran meningkat, implementasi anggaran tersebut masih terbatas, terutama dalam pemenuhan kebutuhan peralatan dan peningkatan kapasitas personel. BPBD Kota Tangerang masih mengandalkan sistem laporan melalui call center 112 dan aplikasi Tangerang Live, yang meskipun efektif, sangat bergantung pada ketepatan laporan masyarakat dan aksesibilitas lokasi. Selain itu, koordinasi antar instansi juga menghadapi kendala, terutama di luar jam operasional, dan belum adanya forum terpadu yang mengintegrasikan koordinasi secara sistematis. Diperlukan perbaikan dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia, distribusi sarana dan prasarana, serta koordinasi antar instansi untuk meningkatkan efektivitas respons terhadap kebakaran.

### **3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas organisasi BPBD Kota Tangerang dalam penanggulangan bencana kebakaran masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama pada aspek sumber daya manusia yang belum sepenuhnya profesional, keterbatasan anggaran, serta belum optimalnya manajemen internal dalam penanganan kebakaran. Selain itu, penanganan kebakaran di wilayah padat penduduk dan kawasan industri menuntut respons cepat yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh BPBD Kota Tangerang. Hal ini sejalan dengan temuan dari Kapucu dan Van Wart (2006) yang menyatakan bahwa keterbatasan sumber daya dan manajemen internal merupakan hambatan utama dalam efektivitas penanggulangan bencana di organisasi pemerintah.

Berbeda dengan studi oleh Paton dan Johnston (2006) yang menemukan bahwa pelatihan dan pengembangan kapasitas melalui edukasi risiko secara signifikan meningkatkan kesiapsiagaan organisasi dan masyarakat di tingkat lokal. Pada penelitian ini, pelatihan telah dilakukan oleh BPBD Kota Tangerang, namun masih belum merata dan belum semua personel memiliki sertifikasi kompetensi kebencanaan. Temuan ini didukung oleh penelitian Wisner et al. (2012), yang menekankan pentingnya sistem peringatan dini dan edukasi masyarakat dalam meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana. Dalam konteks BPBD Kota Tangerang, kelemahan pada aspek deteksi dini dan edukasi publik masih menjadi kendala utama.

Selain itu, penelitian oleh Tierney (2012) menolak anggapan bahwa kota besar secara otomatis memiliki kapasitas penanggulangan bencana yang lebih baik. Kota-kota urban seperti Tangerang menghadapi tantangan unik seperti kepadatan penduduk, kemacetan akses, dan ketergantungan teknologi yang belum optimal. Oleh karena itu,

kapasitas organisasi BPBD di wilayah perkotaan membutuhkan pendekatan strategis yang integratif, meliputi pelatihan SDM berkelanjutan, manajemen risiko berbasis kebencanaan, dan kolaborasi lintas sektor yang kuat.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kapasitas organisasi BPBD Kota Tangerang dalam penanggulangan kebakaran masih belum memadai, terutama pada dimensi sumber daya. Jumlah personel masih kurang dan terdapat keterbatasan dalam pendidikan serta pelatihan teknis. Sarana dan prasarana yang tersedia juga belum mencukupi baik dari segi jumlah maupun kualitas, sementara anggaran yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal. Sistem pelaporan yang bergantung pada call center 112 dan aplikasi Tangerang Live cukup efektif namun masih terkendala dalam kecepatan respons. Di sisi lain, dari aspek manajemen, BPBD telah menunjukkan kepemimpinan dan pengelolaan organisasi yang baik, serta aktif menjalin kerja sama dan membangun relasi dengan berbagai pihak untuk mendukung efektivitas kinerjanya. **Keterbatasan penelitian**, Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Fokus penelitian hanya pada penanggulangan kebakaran oleh BPBD Kota Tangerang, sehingga belum mencakup jenis bencana lainnya. Data yang diperoleh juga terbatas pada wawancara dengan sejumlah informan kunci, yang dapat bersifat subyektif. Selain itu, keterbatasan waktu dan akses menyebabkan peneliti belum dapat mengevaluasi secara mendalam penggunaan anggaran serta efektivitas sistem pelaporan dan teknologi deteksi dini. Keterbatasan ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk penelitian selanjutnya. **Arah masa depan penelitian**, arah masa depan penelitian dapat difokuskan pada pengembangan strategi peningkatan kapasitas organisasi BPBD secara lebih spesifik dan terukur, baik dari aspek sumber daya manusia, teknologi, maupun kebijakan. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji efektivitas program pelatihan dan sertifikasi personel BPBD serta dampaknya terhadap respons kebakaran. Selain itu, penelitian di masa depan juga dapat mengeksplorasi pengaruh distribusi infrastruktur dan armada pemadam terhadap kecepatan dan keberhasilan penanggulangan kebakaran di wilayah padat penduduk. Pengembangan sistem deteksi dini dan integrasi teknologi pelaporan berbasis sensor juga menjadi potensi kajian lanjutan, termasuk evaluasi kesiapan Kota Tangerang dalam menerapkan smart disaster management. Dengan demikian, hasil-hasil penelitian mendatang diharapkan mampu memberikan kontribusi lebih konkret dalam merancang model peningkatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana yang adaptif terhadap tantangan perkotaan.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih saya sampaikan kepada BPBD Kota Tangerang, serta para informan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan data dan informasi yang sangat berharga. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada dosen pembimbing, para pengajar, dan seluruh civitas akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri atas bimbingan, motivasi, dan ilmu yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Tak lupa, saya menghargai segala bentuk dukungan dari keluarga serta pihak lain yang telah memberikan semangat dan kontribusi hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Coppola, D. P. (2007). *Introduction to International Disaster Management* (J. Soucy & C. Pamela, Eds.). Elsevier.
- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). *Collaborative Governance Regimes*. Washington: Georgetown University Press.
- Kapucu, N., & Van Wart, M. (2006). The Emerging Role of the Public Sector in Managing Catastrophic Disasters: Lessons Learned. *Public Administration Review*, 66(s1), 40-53. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00653.x>
- Ma'romah, Z., & Ardianto. (2020). Pengembangan Kapasitas Pemadam Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru. *Jurnal Administrasi Publik Dan Bisnis (JaPaBis)*, 2(2), 46–54.
- Mashar, R., & Khoirul, A. (2019). Upaya Peningkatan Kapasitas Organisasi Pengurangan Resiko Bencana (OPRB) Desa Sambungrejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang. *Jurnal ABM Mengabdi*, 6(2), 73093.
- Mulyadi, M., & Mujahidin. (2023). Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Konstituen*, 5(1), 18–35. <https://doi.org/10.33701/jk.v5i1.3180>
- Paton, D., & Johnston, D. (2006). *Disaster Resilience: An Integrated Approach*. Charles C Thomas Publisher. [https://www.ccthomas.com/details.cfm?P\\_ISBN13=9780398075989](https://www.ccthomas.com/details.cfm?P_ISBN13=9780398075989)
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research and evaluation methods* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Samaham, M. G., & Simbolon, H. (2024). Tata Kelola Kolaboratif Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Other thesis, IPDN.
- Sinamo, S. K., & Rohmadin, S. (2024). Pengembangan Kapasitas Organisasi BPBD dalam Penanggulangan Bencana Longsor di Kabupaten Dairi. IPDN. <http://eprints.ipdn.ac.id/18513/>
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi penelitian pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Sitorus, Y. L. M., Nurmaningtyas, A. R., Usman, S., & Yanthy, N. O. (2021). Peningkatan Kapasitas Daerah dalam Upaya Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tolikara. *PEDULI: Jurnal Ilmiah Pengabdian Pada Masyarakat*, 5(2), 98–107.
- Tierney, K. (2012). Disaster Governance: Social, Political, and Economic Dimensions. *Annual Review of Environment and Resources*, 37, 341-363.
- Wargadinata, E. L. (2017). Kualitas pengukuran kinerja organisasi publik. *Sosiohumaniora*, 19(2), 86–94.
- Wisner, B., Blaikie, P., Cannon, T., & Davis, I. (2012). *At Risk: Natural Hazards, People's Vulnerability and Disasters*. Routledge. <https://www.routledge.com/At-Risk-Natural-Hazards-Peoples-Vulnerability-and-Disasters/Wisner-Blaikie-Cannon-Davis/p/book/9780415588712>